

# **KEPENDUDUKAN, MIGRASI DAN FENOMENA KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Oleh Iswadi Lubis (1.), Surya Perdana (2)

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan (1)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2)

*Kata Kunci: Kependudukan, Migrasi, dan Ketenagakerjaan*

*Analisis demografik pada dasarnya hanya menekankan pada studi jumlah dan komposisi dan variasi komponen perubahannya. Migrasi buruh dari Jawa ke daerah perkebunan dan pertambangan baik di Jawa maupun luar Jawa, bahkan keluar dari negara, telah mengalami kenaikan sesudah 1870 ketika investasi swasta diizinkan. Sampai tahun 1920-an banyak sekali migrasi buruh di bawah sistem kuli kontrak. Pada jaman penjajahan Jepang pernah dilakukan program kerja paksa (romusha). terutama orang Jawa untuk dipekerjakan di pulau lain, bahkan ke daerah Asia Tenggara; dan umumnya tidak kembali, antara lain karena mati. Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan, pada tahun 1950 telah dimulai kembali program pemindahan penduduk yang disebut transmigrasi. Pada saat itu program transmigrasi dilihat sebagai upaya mengatasi ketimpangan distribusi penduduk.*

## **Penduduk**

Masalah kependudukan merupakan fenomena sosial selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan kondisi kelompok penduduk yang jumlahnya terus mengalami penambahan, namun di lain pihak ada kelompok penduduk yang kekurangan. Hal ini terjadi karena adanya dinamika sosial, antara lain terciptanya proses perkawinan, kelahiran, kematian dan migrasi, serta masalah ketenagakerjaan. Proses yang dinamis tersebut terus terjadi untuk semua penduduk dan telah tercipta selektivitas dilihat dari strukturnya. Misalnya menurut jenis kelamin, umur, dan fertilitas. Demikian pula dilihat dari jumlah dan komposisinya telah menyebar dengan intensitas yang berbeda pula.

Menurut Hauser dan Kimmeyer (dalam Bandiyono, 2006:9), demografi dapat dimengerti dan dua segi yaitu demografi formal atau analisis demografik dan demografi sosial atau studi kependudukan. Analisis demografik pada dasarnya hanya menekankan pada studi jumlah dan komposisi dan variasi komponen perubahannya. Dengan demikian seorang demograf formal seluruhnya akan bekerja di antara bidang ilmu fakta-fakta penduduk, yaitu seputar komposisi penduduk, *age-specific fertility*, *age specific mortality*, dan migrasi di mana kesemuanya merupakan faktor-faktor demografik. Dalam pembahasan ini, akan dipaparkan studi kependudukan, migrasi dan fenomena ketenagakerjaan.

**Kependudukan, Migrasi, dan Fenomena Ketenagakerjaan (Iswadi Lubis & Surya Perdana)**

## **Studi Kependudukan**

Awal perhatian tentang masalah penduduk telah lama dilakukan oleh para cendekiawan sejak para filosof China, Plato, Aristoteles dan Yunani, Ibn Khaldun dan Arab, namun penelitian empirik tentang data demograui baru dilakukan pada abad 17. Pada abad tersebut antara lain John Graunt menerbitkan "*Natural and Political Observations .... Made upon the Bills of Mortality*" pada tahun 1662. Kemudian pada abad 18, antara lain Malthus membuat teori pertumbuhan penduduk berupa *Essay on the Principle of Population* pada 1798. Teori kontroversial yang dikemukakan, antara lain ia membuat proposisi dasar tentang manusia dan sumberdaya. Penduduk bila tidak dicegah akan mengalami kenaikan secara geometrik (1,2,4,8,16,32) sedangkan penghidupan (*means of subsistence*) hanya naik dalam rasio arithmatik (1,2,3,4,5,6,7). Demikian pemahaman tentang perkembangan studi kependudukan.

Sebelum kemerdekaan, yaitu pada waktu pemerintah kolonial baik pada zaman penjajahan Inggris maupun pada zaman kolonial Hindia Belanda, kegiatan tentang pendataan kependudukan telah diadakan. Pada tahun 1815, Inggris di bawah Letjen. Raffles pernah melakukan registrasi penduduk. Kemudian registrasi penduduk juga dilakukan pada tahun 1849, tahun 1919, 1929 dan 1939. Di Belanda di Indonesia pernah diadakan sensus penduduk pada tahun 1930. Menurut Hugo (1981), hadirnya penjajah Belanda telah memberi dampak secara langsung terhadap distribusi dan redistribusi penduduk. Dampak langsung yang berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan eksploitasi kolonial dalam bentuk konsentrasi investasi dan kesempatan kerja di daerah tertentu, seperti pelabuhan, pertambangan dan perkebunan. Oleh karena itu hal ini telah membentuk pola yang luas tentang migrasi. Ketimpangan pembangunan dan alokasi sumberdaya adalah elemen kunci dalam menerangkan pola distribusi penduduk dan redistribusi selama kurun waktu kolonial. Selain itu ada program kolonisasi yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1905. Pada waktu itu diadakan program pemindahan penduduk dan daerah Kedu ke desa Gedong Tataan, Lampung Selatan sebanyak 155 keluarga (Ramadhan dan Ahmad, 1983). Dorongan untuk melakukan program kolonisasi yaitu memindahkan penduduk Jawa ke Iuar Jawa. Hal ini karena didorong oleh beberapa alasan antara lain kepentingan buruhmurah oleh perusahaan besar milik kapitalis, untuk

lnengatasi persolan kemiskinan di Jawa akibat politik tanam paksa dan karena pertumbuhan penduduk yang pesat. Sampai tahun 1930, jumlah penduduk Jawa yang dipindahkan, terutama ke Lampung, telah mencapai 162 ribu orang.

Pada zaman penjajahan Jepang pernah dilakukan program kerja paksa (*romusha*), terutama orang Jawa untuk dipekerjakan di pulau lain, bahkan ke daerah Asia Tenggara, dan umumnya tidak kembali, antara lain karena mati. Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan, pada tahun 1950 telah dimulai kembali program pemindahan penduduk yang disebut transmigrasi. Pada saat itu program transmigrasi dilihat sebagai upaya mengatasi ketimpangan distribusi penduduk. Pada saat kolonisasi orang Jawa masih harus dibujuk untuk mau pindah ke Sumatera, namun pada saat program transmigrasi dilaksanakan kemauan untuk pindah cenderung makin besar. Kendati praktik pengendalian penduduk di bumi nusantara ini pernah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, namun pada saat itu kajian ilmiah tentang masalah tersebut masih terbatas.

Setelah Indonesia merdeka, mulai pertengahan tahun 1950-an, pengetahuan modern tentang demografi mulai dirintis bersamaan dengan persiapan alasan diadakannya Sensus Penduduk pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1961 dan dilanjutkan dengan kegiatan Sensus Pertanian (1963) dan Sensus Industri (1964). Perkembangan pengetahuan kependudukan di Indonesia tidak lepas dan sejarah perkembangan kelembagaan dan diikuti dengan perkembangan sumberdaya manusia yang mempelajarinya.

Pada kurun waktu 1970-1995, telah menunjukkan perkembangan pesat kelembagaan yang tertarik dengan isu kependudukan di Indonesia. Pada saat itu banyak penelitian dan kajian kependudukan telah dilakukan, antara lain tentang masalah migrasi dan urbanisasi. Pada saat itu organisasi profesi, Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) menunjukkan kegiatan secara aktif. Indonesia juga menjadi obyek penelitian dan banyak sarjana luar negeri sehingga telah mempercayai khasanah pengetahuan demografi. Salah seorang peneliti asal Australia yang memberi kontribusi besar tentang pengetahuan migrasi di Indonesia adalah Dr. Graeme Hugo, dan Flinders University. Ia telah melakukan penelitian di Indonesia sejak menjadi mahasiswa pada pertengahan tahun 70 an dan telah banyak melakukan kajian tentang mobilitas penduduk hingga saat ini.

## **Fenomena Migrasi di Indonesia**

Para pakar dan pemerhati masalah kependudukan menyadari bahwa ada hubungan timbal balik antara pembangunan dengan kependudukan. Di satu pihak pembangunan mempengaruhi variabel kependudukan, namun sebaliknya variabel kependudukan mempengaruhi pembangunan. Migrasi sebagai komponen kunci dalam dinamika penduduk telah mengakibatkan berbagai perubahan dalam masyarakat misalnya perubahan komposisi penduduk, dan perubahan tingkat pertumbuhan penduduk. Sebagai contoh, di Batam dan Bontang-Sangatta sebagai daerah kawasan investasi industri telah menimbulkan dampak masuknya arus migrasi tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri ke daerah tersebut dalam jumlah yang besar. Penduduk kawasan tersebut lantas tumbuh dengan pesat. Adapun masuknya sejumlah migran yang kurang selektif ke daerah tersebut telah menimbulkan permukiman kumuh, sehingga telah mempengaruhi ketertiban lingkungan sehingga pada gilirannya telah mempengaruhi kenyamanan iklim investasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah yang luas dan terletak di daerah tropika, di samping mempunyai keuntungan berupa kekayaan sumberdaya alami yang potensial, juga memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, dan mempunyai jumlah etnis yang paling besar, kurang lebih sebanyak 360. Indonesia merupakan salah satu anggota warga dunia yang tidak dapat menghindar dari arus globalisasi. Globalisasi berarti bukan hanya arus modal, produk, teknologi dan informasi yang akan bertambah besar masuk ke Indonesia, tetapi juga arus manusia. Hal ini berarti bahwa Indonesia mempunyai peluang dan tantangan internal dan internasional untuk pembangunan.

Di Indonesia baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang ternyata tidak merata untuk semua daerah sehingga telah menimbulkan perbedaan kemampuan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Pulau Jawa yang hanya mempunyai luas 6,9 persen dari luas daratan Indonesia namun mempunyai penduduk hampir duapertiganya. Ketimpangan distribusi penduduk tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti dalam empat dasawarsa terakhir. Persentase penduduk di Pulau Jawa hanya mengalami penurunan dari 64,9 persen pada tahun 1961 menjadi 59,3 persen pada tahun 2000. Persentase penduduk

yang tinggal di luar Jawa dengan sendirinya mengalami penambahan dan 35,1 persen menjadi 40,7 persen pada kurun waktu yang sama. Penurunan proporsi penduduk di Pulau Jawa tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama angka pertumbuhan penduduk alami di Jawa lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk alami di luar Jawa, kedua karena perpindahan penduduk ke luar Jawa lebih besar daripada yang masuk ke Pulau Jawa (migrasi netto negatif). Oleh karena itu angka kepadatan penduduk di Pulau Jawa jauh lebih tinggi daripada kepadatan penduduk di luar Jawa. Pada tahun 2000, kepadatan penduduk di Pulau Jawa telah mencapai di atas 870 sedangkan di luar Jawa kepadatan penduduknya baru mencapai 47 jiwa per kilometer persegi.

Perbedaan tersebut tentunya merefleksikan perbedaan kondisi ekologis sehingga mempengaruhi kemampuan daya tampung terutama dalam menyediakan kebutuhan pangan. Distribusi penduduk antarwilayah yang belum seimbang dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan alam maupun buatan tentunya berkaitan erat dengan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu baik secara individu maupun secara kelompok, orang akan merespon adanya perbedaan peluang dan perbedaan kemampuan tersebut dengan melakukan migrasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka yang mempunyai akses informasi akan pilihan-pilihan di daerah lain yang dianggap mempunyai peluang lebih baik akan melakukan migrasi dari pada harus tinggal di daerahnya. Kendati keputusan seseorang untuk pindah adalah bervariasi, namun umumnya alasan utama adalah ekonomi.

Migrasi sebagai faktor penentu dalam distribusi penduduk telah menyebabkan perubahan jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dan data distribusi penduduk Indonesia menurut pulau besar yang menunjukkan perubahan sebagai berikut: 1) Distribusi penduduk Indonesia tidak pernah merata. 2) Persentase penduduk di Jawa terus mengalami penurunan. 3) Persentase penduduk di Sumatera dan di Kalimantan terus naik. 4) Persentase penduduk di Sulawesi mengalami penurunan, kecuali pada periode 1990-2000. 5) Persentase penduduk di pulau lainnya mengalami penurunan, kecuali pada periode 1980-1990.

### Distribusi Penduduk Di Indonesia 1961-2000

Pulau	Persentase terhadap penduduk					Perubahan dalam persentase			
	1961	1971	1980	1990	2000	1961 - 1971	1971 - 1980	1980 - 1990	1990 - 2000
Jawa	64,9	63,8	62,1	60,0	59,3	-1,1	-1,7	-2,1	-0,7
Sumatera	16,2	17,4	19,1	20,3	21,0	+1,2	+1,7	+1,2	+0,7
Kalimantan	4,2	4,3	4,6	5,1	5,4	+0,1	+0,3	+0,5	+0,3
Sulawesi	7,3	7,2	7,1	7,0	7,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Pulau lainnya	7,4	7,3	7,1	7,6	7,2	-0,1	-0,2	+0,5	-0,4
Indonesia	100 (90,0 juta)	100 (119,1 juta)	100 (146,7 juta)	100 (179,2 juta)	100 (201,2 juta)	-	-	-	-

Sumber: Dihitung dari hasil Sensus Penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000

Catatan: sensus penduduk 1980 dan 1990, termasuk Timor Timur, Sensus Penduduk 2000, tidak termasuk Timor Timur

Meskipun usaha untuk melakukan redistribusi penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Hindia-Belanda baik secara langsung maupun secara tidak langsung namun apabila dilihat dari segi demografi tingkat migrasi seumur hidup di Indonesia masih rendah. Hasil Sensus 1971 menunjukkan bahwa hanya ada 5.703.037 atau 4,8 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di propinsi yang berbeda dengan propinsi di mana mereka dilahirkan (*lifetime migrants*). Pada tahun 1985 baru mencapai 7 persen, dan pada tahun 2000 migrasi seumur hidup sebesar 10,1 persen. Rendahnya tingkat mobilitas tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh kegiatan ekonomi penduduk yang umumnya masih berbasis pertanian. sehingga mereka terikat dengan

kegiatannya, meskipun ada kelompok etnis yang tergolong mobilitasnya tinggi yaitu Bugis, Makasar, Banjar, Madura dan Minangkabau. Penduduk dan Sulawesi Selatan yang umumnya adalah etnis Bugis dan etnis Makasar telah merantau ke provinsi lain terutama daerah pesisir, mulai dari Papua sampai dengan Sumatera bagian timur. Adapun penduduk etnis Minangkabau kebanyakan merantau ke daerah perkotaan di provinsi luar Sumatera Barat, terutama di Jawa, Provinsi Riau dan bahkan ke Malaysia. Fenomena orang merantau ke negeri lain untuk memperbaiki nasibnya telah menjadi tradisi.

Hasil analisis Bandiyono (1999) berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1990 dan Supas 1995 menunjukkan perubahan pola migrasi berdasarkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Perbedaan kondisi kependudukan dan perekonomian antardaerah dapat menjadi faktor pendorong atau faktor penarik bagi penduduk untuk melakukan mobilitas. Data Sensus Penduduk 1990 menunjukkan bahwa ada 54 persen migran masuk KTI berasal dari provinsi-provinsi KBI. Pada tahun 80-an KTI adalah daerah utama penempatan transmigrasi, terutama menuju Irian Jaya. Demikian pula banyak pegawai dan Bali, Jawa dan Sumatera yang ditempatkan di Timor Timur. Sebaliknya migrasi keluar dari KTI ke KBI hanya 36 persen. Adapun pada tahun 1995 arus migrasi masuk ke KTI turun menjadi 49 persen, dan sebaliknya arus migrasi keluar KTI menuju KBI mengalami peningkatan menjadi 47 persen. Meskipun ada peningkatan arus migrasi keluar dari KTI menuju KBI namun arus migrasi ke KTI masih lebih besar.

### **Fenomena Ketenagakerjaan**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia tahun 2004 kurang lebih 217 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yaitu sekitar 1,7 persen/tahun. Hal ini menyebabkan kecenderungan penambahan penduduk termasuk yang tertinggi di dunia. Pada saat ini dengan pecahnya Uni Soviet, Indonesia menjadi Negara ke empat terpadat penduduknya di dunia setelah RRC (sekitar 1,3 milyar), India (1 milyar), dan Amerika Serikat (270 juta).

Masalah ketenagakerjaan ini muncul antara lain karena kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Indonesia sangat rendah, yang disebabkan oleh tingkat pendidikan penduduk dan angkatan kerja pada umumnya berpendidikan di bawah standar, dibandingkan kualifikasi dan kompetensi yang diinginkan oleh badan usaha. Indikator lain adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Kualitas Manusia yang dikembangkan oleh UNDP, melukiskan kondisi pendidikan, harapan hidup atau kesehatan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing Negara. Indeks tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia semakin merosot dari tahun ke tahun. Sempitnya lapangan kerja yang tersedia mendorong pencari kerja khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI) melakukan migrasi untuk mencari hidup di Negara lain. Tingginya penghasilan/gaji yang diperoleh juga menjadi daya dorong terjadinya migrasi tersebut (Lee dalam Adi, 1998:17).

### **Penempatan Buruh Migrasi Indonesia**

Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini kemudian diamandemen dengan pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian mendapat pekerjaan adalah hak bagi setiap warga Negara. Selanjutnya, pasal 38 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa. *Pertama*, setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; *Kedua*, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; *Ketiga*, setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; *Keempat*, setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjajamin kelangsungan kehidupan keluarganya.



Landasan yuridis tersebut secara tegas menyatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi dan dijamin oleh hukum. Karena itu, semua pihak termasuk pemerintah, tidak diperkenankan melarang seseorang untuk mencari kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya, termasuk bekerja dan menjah TKI di negara lain. Landasan yuridis tersebut juga dimaksudkan agar pemerintah mendorong meningkatkan, melindungi dan mengatur tenaga kerja yang bermigrasi untuk bekerja di negara lain.

Pada mulanya mobilitas TKI ke luar negeri terjadi berdas pada prakarsa dan upaya dari TKI itu sendiri. Semakin hari semakin baik TKI yang tertarik untuk bermigrasi ke luar negeri untuk mencari kerja. Dampak positif dan kegiatan tersebut adalah sebagai upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran, meningkatkan keterampilan kerja dan mendatangkan keuntungan berupa naiknya Kependudukan, Migrasi, dan Fenomena Ketenagakerjaan (Sward Lubis & Surya Perdana) devisa Negara. Upaya ini juga dimaksudkan untuk melindungi TKI tersebut dan perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kompetensi para TKI diamati dan angka tingkat pendidikan. angkatan kerja penduduk Indonesia tahun 2000 yang memperlihatkan 75,86 persen angkatan kerja berpendidikan SLTP ke bawah, termasuk di dalamnya 63 persen berpendidikan SD Iatau kurang dan itu. Kompetensi para pekerja migran (TKI) berkorelasi dengan tingkat pendidikannya. Kebanyakan TKI bekerja pada berbagai jenis pekerjaan antara lain: Pekerja penata laksana rumah tangga, buruh pabrik, dan pekerja kebun di luar negeri.

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. di tinjau dan jumlah dan penganihnya bagi kondisi ketenagakerjaan dalam negeri secara khusus belum menimbulkan dampak yang signifikan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar (jumlah TKI kurang Iebih 1,5persen dan angkatan kerja di Indonesia). Namun bagi negara penerima, jika jumlah TKI relatif besar dibanding penduduk setempat boleh jadi menimbulkan ketegangan politis, ekonomi dan sosial. Hal ini tercermin antara lain dengan sebab-sebab diberlakukannya Undang undang Keimigrasiaan yang berlaku di Malaysia.

Arah kebijakan nasional dalam penginiman dan penempatan tenaga kerja luar negeri tersebut mengandung misi (Pigay, 2005:103) sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Hal ini juga dimaksudkan agar TKI yang bekerja di luar negeri menempati posisi yang layak, yang membutuhkan keahlian, keterampilan dan inteligensi, dan tidak hanya sebagai buruh kasar.
  - 2) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dengan menepis anggapan bahwa Indonesia merupakan negara yang hanya mampu menghasilkan kuli;
  - 3) Meningkatkan penempatan dan penghasilan TKI yang bekerja di luar negeri yang nantinya juga diharapkan mampu meningkatkan devisa negara. Hal ini sangat penting karena ekspor minyak dan gas bumi yang semula dominan semakin menurun, sedangkan Indonesia sekarang ini masih dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi Negara sebagai akibat dari krisis ekonomi;
  - 4) Memberikan dan meningkatkan perlindungan dan pembelian terhadap TKI baik sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri;
  - 5) Mencegah dan mengantisipasi eksploitasi terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

Madani, Vol. 7, No. 3, Oktober 2006

## **Penutup**

Meneliti isu kependudukan merupakan upaya untuk membaca atau memahami fakta-fakta sosial yang hidup di masyarakat yang merupakan sebagian potret dari siklus kehidupan manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia, di mana pun dan kapan pun, senantiasa selalu terjadi proses perubahan yang ditandai adanya kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Kejadian tersebut telah melahirkan dinamika kependudukan yang berbeda menurut dimensi waktu maupun menurut dimensi ruang. Banyak faktor non-demografi yang menyebabkan komponen demografi terus mengalami perubahan, dan sebaliknya. Oleh karena itu upaya untuk terus menerus melakukan penelitian kependudukan merupakan keharusan. Hal ini merupakan bagian dan proses menuju pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan yang dinamis, pada gilirannya diharapkan dapat menjadi masukan menuju upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia masa depan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah ilmiah, pada dasarnya merupakan upaya kolaboratif melalui proses deduksi dan proses induksi.

Ahli kependudukan yang tertarik dengan penelitian migrasi penduduk jumlahnya masih terbatas. Salah satu faktor karena fenomena migrasi penduduk secara metodologis lebih sulit untuk diukur dibandingkan dengan penelitian fertilitas atau pun mortalitas. Meskipun demikian untuk memberi prioritas penelitian migrasi agar lebih bermakna manakala variabel migrasi dianggap sebagai variabel bebas (*independent variable*), karena dapat mengkaji dampak yang diakibatkan, antara lain dapat menyebabkan perubahan sosio-demografi misalnya terjadinya konflik sosial, dapat meningkatkan kualitas penduduk atau bahkan sebaliknya. Penelitian yang melihat migrasi sebagai variabel bebas merupakan agenda penelitian yang perlu lebih banyak dilakukan di Indonesia, sejalan dengan kebijakan untuk pengendalian migrasi penduduk.

**Kependudukan, Migrasi, dan Fenomena Ketenagakerjaan (Iswadi Lubis & Surya Perdana**

## Daftar Pustaka

- Bandiyono, Suko. 2006. Relevansi Karya Penelitian Migrasi Dalam Pembangunan. *Makalah Orasi Ilmiah* disampaikan pada untuk pengukuhan professor Riset Bidang Kependudukan. Jakarta. Widyagraha LIP1 23 Maret 2006.
- Bino Pusat Statistik. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 1961, 1971,1980, 1991, 2000. Jakarta: BPS
- Data Survey Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, tahun 2002. Jakarta.
- Depnaker RI, 2003. *Situasi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: Depnaker.
- Hugo, Grame J. 1981. Policies and Programmes Affecting Migration and Urbanization in Indonesia. Dalam Migration, Urbanization and Development in Indonesia. New York: UN (Country Report III).
- Lee, Everett dalam Rianto Adi. 1998. *Warta Demografi* No.3 Tahun ke-28.
- Pigay, Natalis. 2005. *Migrasi Tenaga Kerja Inteternasiona*. (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ramadhan KH; Hamid Jabbar Rofiq Ahmad. 1993. *Transmigrasi, Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Departemen Transmigrasi RI.
- Rucker, Robert, L. 1985. *Apreleminaiy View of Indonesia's Employment Problem and some options for solving it*. Jakarta: USAID.
- Suhartono P. 1980. "Population and Vital Registration in Indonesia." *Majalah Demografi Indonesia*. No13(VII).1980.